

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Di dalam instansi pemerintah, sumber daya manusia yang dimaksud adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberadaan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) turut serta menjadi salah satu faktor dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak-hak yang harus diterima, salah satunya yaitu hak atas kenaikan pangkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Kenaikan pangkat dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Dalam proses pengembangan kariernya setiap individu yaitu masing-masing pegawai tidak dapat bergantung pada usaha individual saja, hal tersebut harus sejalan dengan kepentingan instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengembangan karier pegawai dengan tujuan yang diinginkan oleh instansi harus saling mendukung.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kebutuhan manusia akan teknologi saling berjalan beriringan. Teknologi berkembang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi informasi. Saat ini teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan dan non pemerintahan, salah satunya dalam pengelolaan informasi di bidang kepegawaian dengan tujuan mampu mendukung kegiatan operasional secara cepat dan akurat. Pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sistem kepegawaian yang sedang berjalan belum mendukung proses kelancaran pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai. Oleh karena itu, pada proses kenaikan pangkat pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020 terdapat *gap* antara jumlah pegawai naik pangkat dengan SK Kenaikan pangkat

yang tepat waktu. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

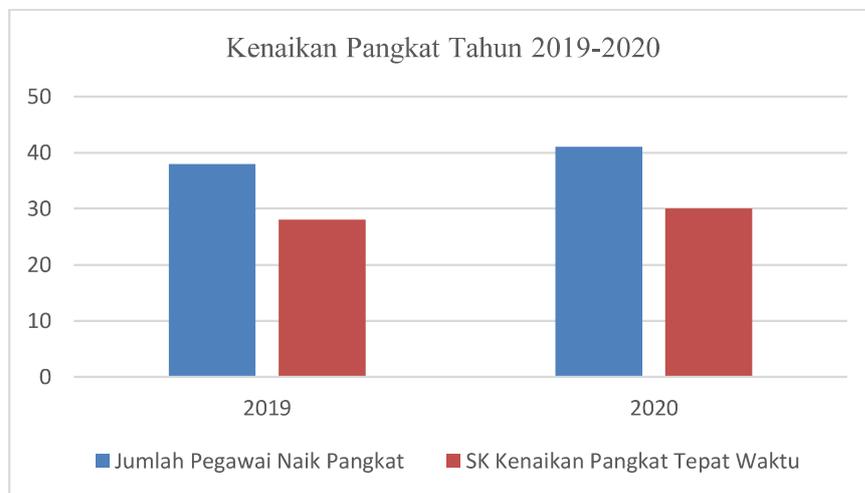
Tabel 1. 1 Kenaikan Pangkat Tahun 2019 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Pegawai Naik Pangkat	SK Kenaikan Pangkat Tepat Waktu	GAP
1.	2019	38	28	10
2.	2020	41	30	11

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Keterangan :

1. GAP : SK kenaikan pangkat terlambat terbit



Gambar 1. 1 Kenaikan Pangkat 2019 dan 2020

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, jumlah pegawai yang naik pangkat pada tahun 2019 terdapat gap (berkas yang terlambat) sejumlah 10 berkas, dan pada tahun 2020 terdapat gap (berkas yang terlambat) sebanyak 11 berkas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Sub Bagian Kepegawaian yaitu Ibu Yuni Frida Saragih pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 10.41 WIB, Prosedur Kenaikan Pangkat yang dilakukan di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses pertama, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan mengeluarkan Surat Edaran Kenaikan Pangkat yang dikirimkan ke Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi DKI

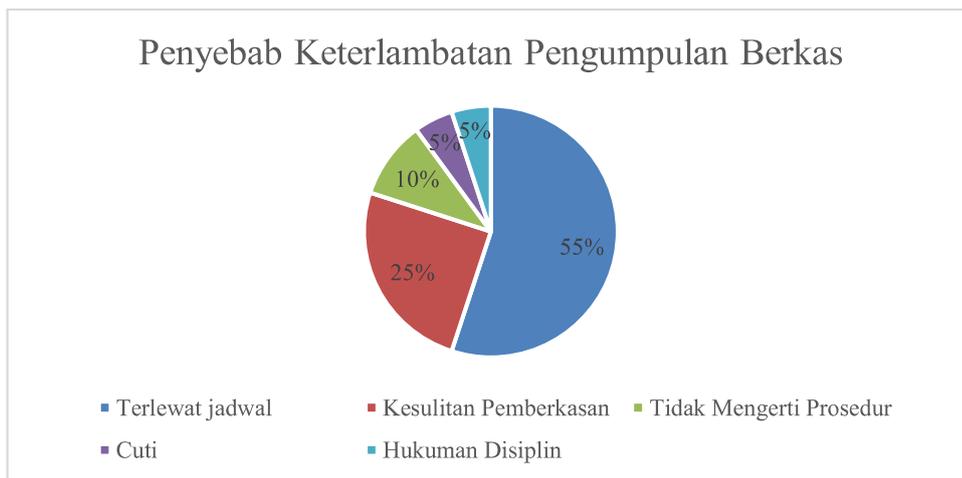
Jakarta 5(lima) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dilaksanakan. Kenaikan pangkat dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Untuk kenaikan pangkat 1 April, surat edaran diberikan di bulan November dan kenaikan pangkat 1 Oktober, surat edaran diberikan pada bulan Mei.

2. Setelah Sub Bagian Kepegawaian menerima Surat Edaran Kenaikan Pangkat dari BKD Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya surat pemberitahuan tersebut diteruskan dalam bentuk surat resmi kepada Tata Usaha Unit Kerja Perangkat Daerah (TU UKPD) yang dibawah langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, TU UKPD meneruskan informasi Surat Edaran Kenaikan Pangkat kepada pegawai.
3. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kenaikan Pangkat para pegawai yang ingin mengajukan kenaikan pangkat (pemohon) harus menyiapkan berkas persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan jenis kenaikan pangkatnya. Pihak Sub Bagian Kepegawaian memberikan waktu selama 1(satu) bulan kepada pemohon untuk mengumpulkan seluruh kelengkapan kenaikan pangkat.
4. Setelah dokumen diserahkan oleh pemohon kepada masing-masing TU UKPD, pihak TU UKPD akan membuat nota usulan kenaikan pangkat yang akan dikirimkan beserta dengan dokumen pemohon ke Sub Bagian Kepegawaian.
5. Proses yang dilakukan selanjutnya oleh pihak Sub Bagian Kepegawaian adalah melakukan validasi dokumen persyaratan kenaikan pangkat pemohon. Ibu Yuni Frida Saragih selaku staff Sub Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab dalam memeriksa kembali kelengkapan berkas pemohon.
6. Setelah proses validasi, Sub Bagian Kepegawaian membuat surat pengantar kenaikan pangkat.
7. Selanjutnya surat pengantar yang sudah dibuat oleh Sub Bagian

Kepegawaian diparaf oleh Sekretaris Dinas.

8. Proses berikutnya, surat pengantar juga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
9. Tahap terakhir, Sub Bagian Kepegawaian mengirim surat pengantar kenaikan pangkat serta dokumen pemohon kepada Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan alur proses kenaikan pangkat yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena keterlambatan Kenaikan Pangkat Tahun 2019 dan 2020 selalu terjadi dan faktor yang menjadi permasalahan terdapat pada proses ketiga, yaitu pengumpulan berkas oleh pegawai. Sampai saat ini, tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian untuk mengatasi keterlambatan pengumpulan berkas pegawai, karena Sub Bagian Kepegawaian pun tidak memiliki *database* khusus untuk melihat siapa saja pegawai yang sudah layak untuk naik pangkat pada periode bersangkutan. Berdasarkan kondisi eksisting, penyampaian informasi Surat Edaran Kenaikan Pangkat masih tidak tepat pada sasaran. Keterlambatan pengumpulan berkas oleh pegawai yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

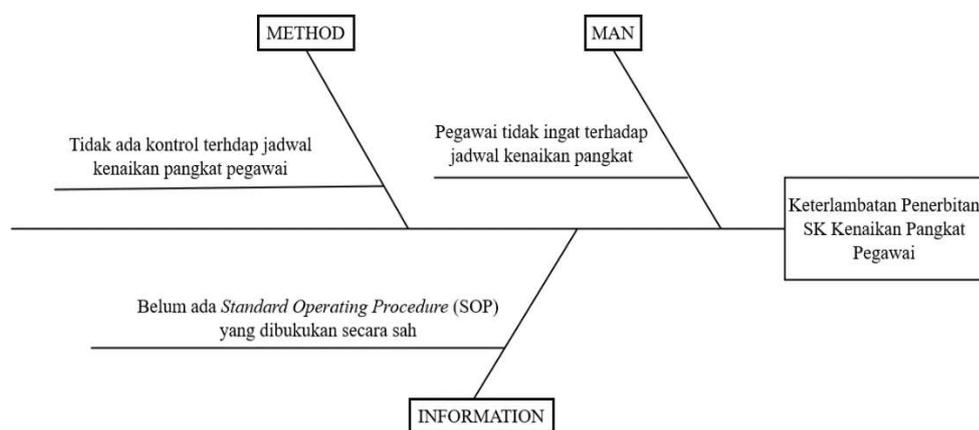


Gambar 1. 2 Diagram Penyebab Keterlambatan Pengumpulan berkas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 20 pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengenai penyebab keterlambatan pengumpulan berkas kenaikan pangkat tahun 2019 dan 2020, dapat dilihat

penyebab yang sangat dominan adalah pegawai terlewat jadwal kenaikan pangkat karena selama ini pemberitahuan dari Sub Bagian Kepegawaian kurang efektif dan informatif karena hanya berisi pemberitahuan waktu (batas pengumpulan berkas) kenaikan pangkat tanpa disertai informasi yang mendukung. Kenaikan pangkat adalah salah satu bentuk hak bagi seluruh pegawai, maka dari itu Sub Bagian Kepegawaian seharusnya memberikan pelayanan yang maksimal berupa pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pegawai dari awal hingga proses pengumpulan berkas kenaikan pangkat selesai.

Berdasarkan data-data diatas, untuk meneliti permasalahan lebih lanjut, maka diperlukannya *tools* untuk mendalami terkait akar masalah yang ada dan dilakukan perancangan alternatif solusi yang tepat. *Tools* yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pada perancangan ini adalah *fishbone diagram*. *Fishbone diagram* adalah diagram visual yang membantu dalam menganalisis sebab akibat untuk mengidentifikasi faktor-faktor masalah yang berpotensi dimana faktor masalah tersebut digolongkan sesuai dengan kategori utama untuk mengidentifikasi permasalahan utama (Coccia, 2017). Berikut pemetaan *fishbone diagram* pada penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 1. 3 *Fishbone Diagram*

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas, uraian akar masalah keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat Pegawai dilihat dari perspektif teknik industri disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor *man* (manusia), *methode* (metode), dan *information* (informasi). Identifikasi pada faktor *man*

(manusia) adalah pegawai tidak ingat terhadap jadwal kenaikan pangkatnya dan kesulitan dalam pemberkasan. Faktor *method* (metode) terdapat kendala tidak adanya kontrol terhadap jadwal kenaikan pangkat pegawai. Faktor *information* (informasi) terdapat kendala karena belum adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) kenaikan pangkat yang belum dibukukan secara sah.

1.2 Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil analisis akar masalah dengan menggunakan *tools* berupa *fishbone diagram*, didapatkan alternatif solusi dari setiap masalah yang ada. Analisis potensi solusi berdasarkan akar permasalahan yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Alternatif Solusi

No.	Akar Masalah	Potensi Solusi
1	Pegawai terlewat jadwal kenaikan pangkatnya	Perancangan <i>dashboard readiness</i> kenaikan pangkat di Dinas
2	Tidak ada kontrol terhadap jadwal kenaikan pangkat pegawai	Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3	<i>Standar Operational Procedure</i> (SOP) Kenaikan Pangkat belum dibukukan secara sah	Perancangan Standard Operational Procedure (SOP) Kenaikan Pangkat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan analisis akar masalah pada tabel 1.2 diatas, terdapat 3(tiga) akar masalah dan 2(dua) potensi solusi terhadap masalah utama. Dari kedua alternatif solusi, dipilihlah alternatif solusi yang berdampak signifikan terhadap permasalahan utama di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Solusi terpilih adalah Perancangan Perancangan *Dashboard Readiness* Kenaikan Pangkat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kenaikan pangkat sehingga penyampaian informasi tersebut tepat pada sasaran. Untuk solusi kedua, yaitu Perancangan

Standard Operational Procedure (SOP) Kenaikan Pangkat sedang dalam tahap pembuatan oleh Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Perancangan *Dashboard readiness* Kenaikan Pangkat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

I.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Membuat Perancangan *Dashboard readiness* Kenaikan Pangkat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan efektivitas proses untuk meminimalisasi keterlambatan.

I.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini, yakni sebagai berikut :

1. Pihak Instansi
 - a. Menjadi usulan dalam perancangan proses bisnis kenaikan pangkat pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Membantu instansi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan manajemen dan tata kelola kepegawaian.
 - c. Membantu memberikan informasi kepada pegawai Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan hak atas kenaikan pangkatnya.

2. Bagi Akademisi

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca mengenai Perancangan *Dashboard Readiness* Kenaikan Pangkat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan Business Process Improvement (BPI).

I.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian mengenai konteks permasalahan, latar belakang permasalahan yang berisi mengenai masalah kompleks atau *complex problem* pada objek yang diteliti, alternatif solusi

dengan tujuan menciptakan banyak solusi dari permasalahan kompleks berupa sistem terintegrasi, perumusan masalah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan sebuah sistem terintegrasi, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang literatur, teori, dan istilah yang relevan untuk mendukung penelitian tugas akhir dalam proses analisis. Teori yang digunakan bersumber dari referensi buku, penelitian terdahulu, serta referensi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung perancangan dan menyelesaikan masalah.

BAB III Metodologi Perancangan

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam menyusun penelitian terkait kerangka dan sistematika pemecahan masalah kompleks yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini yang mencakup penetapan metode yang digunakan dalam merumuskan masalah, mengembangkan model, mengidentifikasi proses bisnis, merancang pola dalam pengumpulan dan pengolahan data, dan merancang analisis pengolahan data dalam rangka perancangan sistem terintegrasi untuk penyelesaian permasalahan

BAB IV Perancangan Sistem Terintegrasi

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengampliasian dari metodologi penelitian yang telah disusun, pengumpulan data dan pengolahan data, serta perancangan solusi dari permasalahan yang sudah ditetapkan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Data tersebut diolah hingga hings menghasilkan sebuah sistem perancangan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tugas akhir ini.

BAB V Validasi dan Evaluasi Hasil Rancangan

Pada bab ini disajikan mengenai hasil perancangan yang telah

dibuat, temuan, analisis dan pengolahan data yang telah diselesaikan sebelumnya yang terdapat pada Bab IV. Bab ini juga mencakup hasil validasi dari solusi yang dipilih. Tujuan dari dilakukannya validasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah hasil rancangan tercapai atau tidak.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini menguraikan mengenai penjelasan yang diperoleh berdasarkan hasil perancangan yang sudah dilakukan. Bab ini juga berisikan saran terhadap perancangan solusi perbaikan untuk organisasi dan perancangan tugas akhir lanjutan pada masa mendatang